

MEMULIHKAN DEMOKRASI YANG RUSAK? AKTUALISASI KONSEP “NATALITAS” ARENDT DI ERA DIGITAL*

FRANSISCO BUDI HARDIMAN

Program Studi Magister Hubungan Internasional,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pelita Harapan
Tangerang, Indonesia
E-mail: fransisco.hardiman@uph.edu

Received: 30 Jan 2026 **Revised:** 4 Apr 2026 **Accepted:** 6 Apr 2026

Abstract: Can democracy, which has been damaged in this digital age, still be restored? Hannah Arendt, who experienced democracy being destroyed by the German totalitarian regime, offers a powerful ray of hope for the restoration of democracy. Through phenomenological approach, she views humans as beings capable of making new beginnings, an ability she calls natality. Unlike the bleak picture in *The Origins of Totalitarianism*—in which Arendt analyzes the collapse of the republic through the destruction of public space—the concept of natality in *The Human Condition* opens up the possibility for the restoration and reinvigoration of the republic. However, the author argues that Arendt’s republican ideas face challenges in the digital communication era. Therefore, before suggesting ways to restore democracy according to Arendtian perspective, the author first explains the new difficulties facing democracy in the digital era and reinterpret natality in this new context as a practice of resistance to algorithmic determinism. In the digital age, humans do not lose their natality; they can always reopen the possibility of starting something new.

Keywords: democracy, natality, plurality, public legislation movement, republic, digital communication

Abstrak: Apakah demokrasi yang rusak di era digital ini masih dapat dipulihkan? Hannah Arendt yang mengalami demokrasi yang dirusak

* The paper is presented in the framework of “50 Years After the Passing of Hannah Arendt” in Indonesia; a joint programme by Goethe-Institut Indonesien and STF Driyarkara.

oleh rezim totaliter Jerman memberi cahaya harapan yang sangat kuat untuk pemulihan demokrasi. Lewat pendekatan fenomenologis ia memandang manusia sebagai makhluk yang mampu membuat permulaan baru, kemampuan yang disebutnya natalitas. Berbeda dari gambaran kelabu dalam *Ursprünge totaler Herrschaft* (1955) – di mana Arendt menganalisis proses runtuhnya republik melalui penghancuran ruang publik – konsep natalitas dalam *Vita activa* (1960) membuka kemungkinan bagi pemulihan dan penguatan kembali republik. Namun penulis berpendapat bahwa gagasan republikan Arendt ini mendapat tantangannya di era komunikasi digital, sehingga sebelum menyarankan cara pemulihan demokrasi dalam perspektif Arendtian penulis lebih dahulu menjelaskan kesulitan-kesulitan baru bagi demokrasi di era digital. Penulis akan memaknai kembali natalitas dalam konteks baru ini sebagai praktik resistensi atas determinasi algoritmik. Di era digital manusia tidak kehilangan natalitas; ia selalu dapat membuka kembali kemungkinan untuk memulai sesuatu yang baru.

Kata-kata Kunci: demokrasi, gerakan legislasi publik, natalitas, pluralitas, republik, komunikasi digital

PENDAHULUAN

Apakah Indonesia masih dapat diperbaiki? Pertanyaan ini muncul setelah publik menyaksikan apa yang merupakan fenomena baru dalam politik kontemporer: kemunduran demokrasi justru di tengah digitalisasi politik. Di Indonesia masalah ini telah memunculkan rangkaian aksi protes berbagai kampus dan gerakan turun ke jalan dan media-media sosial bertajuk 'Indonesia Gelap' dan baru-baru ini di Agustus 2025 juga terjadi demonstrasi besar yang menuntut pembubaran DPR. Indonesia bukan satu-satunya negara yang mengalami hal itu. Dalam penelitiannya, *Democracy in Retreat: The Revolt of the Middle Class and the Worldwide Decline of Representative Government* (2013) Joshua Kurlantzick membeberkan kemunduran demokrasi itu berlangsung di Asia, Eropa Timur, Amerika Latin, dan Afrika. Di Asia Tenggara, misalnya, ia menunjukkan kemunduran itu di negara-negara, seperti Thailand, Filipina, Malaysia, dan Indonesia. Penyebabnya antara lain adalah kelas menengah yang kecewa

dan berbalik mendukung kekuasaan otoriter, kegagalan dalam pemberantasan korupsi, kriminalisasi oposisi, pembatasan kebebasan pers, dan kegagalan Barat sebagai model demokrasi.

Demokrasi tidak harus diganti dengan sistem pemerintahan yang lain. Ada pasang surut dalam demokrasi. Hal itu berarti bahwa demokrasi adalah suatu proyek yang belum selesai dan memerlukan koreksi-koreksi. Untuk menjawab pertanyaan di atas, ada baiknya kita belajar dari pemikiran seorang pemikir berlatarbelakang Yahudi Jerman yang bergumul dengan masalah itu di era Nazi: Hannah Arendt (1906-1975). Filsuf perempuan ini mengalami sendiri bagaimana demokrasi dirusak oleh rezim totaliter yang mengubah-ubah undang-undang, memanipulasi media, melakukan pembantaian terhadap minoritas. Ia yang menyaksikan sendiri bagaimana demokrasi hancur berkeping-keping oleh propaganda dan teror masih sanggup merenungkan keadaan ideal sebuah republik. Arendt mengajak kita untuk menemukan kekuatan pembaruan yang melekat pada setiap manusia yang menjadi warga sebuah republik. Ia yakin bahwa kita, warga sebuah republik, dapat membuat permulaan baru dalam politik setelah politik itu dibusukkan oleh rezim teror yang menganggap manusia tak ubahnya sampah yang berlebihan saja. Jadi, meskipun untuk keruntuhan republik Arendt membuat metafor-metafor horor, seperti "*die Hölle des Vergessens*" (neraka penglupa) atau "*das radikal Böse*" (kejahatan radikal), Arendt tetap menyisakan ruang harapan bahwa kita, warga sebuah republik, dapat memulai lagi yang baru. Kemampuan untuk membuat permulaan baru atau *natalitas* ini bukan harapan kosong. Kita menyaksikan sendiri bagaimana Jerman pasca-Hitler dan negara-negara Eropa Timur pasca-Perang Dingin mendemokratisasi diri, yaitu – katakanlah – lahir baru.

Dalam artikel ini kita akan menimba inspirasi dari konsep Arendt tentang natalitas untuk membangun harapan akan pemulihan sebuah demokrasi yang mengalami kerusakan, dan bukan kebetulan bahwa kerusakan itu terjadi justru di era komunikasi digital. Kita akan mengulas topik ini dalam empat tahap. Pertama-tama kita membicarakan lebih dahulu pendekatan fenomenologis yang dilakukan oleh Arendt (I), sebelum

kita masuk ke dalam konsep Arendt tentang tindakan kolektif dengan membandingkan pandangannya dalam kedua karyanya, yakni *Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft* [1955] dan *Vita activa* [1960] (II) Dari situ kita mulai masuk ke dalam pandangan Arendt tentang natalitas politis (III) dan memberi komentar kritis dan rekomendasi atas konsep natalitas politisnya (IV). Semua ini akan kita pertanyakan kembali di akhir ulasan ini.

I. HANNAH ARENDT DAN FENOMENOLOGI POLITIS

Hannah Arendt lahir di kota Königsberg pada 14 Oktober 1906 dari keluarga Yahudi Jerman yang tercerahkan. Sejak kecil ibunya sudah mendidiknya untuk melawan setiap umpatan antisemitis. Setelah pindah ke Hannover, ia kerap berjalan-jalan sore dengan kakeknya yang suka bercerita dan darinya ia menyukai narasi. Sejak kecil ia sudah dilatih membaca dalam bahasa Latin dan Yunani. Sebagai Yahudi Jerman ia sempat ditahan di Kamp Konsentrasi tetapi berhasil melarikan diri, lalu bermigrasi dan menjadi warganegara USA. Pemikiran Arendt dipengaruhi oleh beberapa filsuf, seperti Aristoteles, Agustinus, Kant, Jaspers, dan terutama Heidegger. Ia menulis beberapa karya, antara lain yang akan kita bahas dalam makalah ini, yakni: *Ursprünge totaler Herrschaft* dan *Vita activa*.

Seperti di negara-negara lain, di Indonesia Hannah Arendt juga dikenal sebagai seorang filsuf politis, meskipun ia tidak begitu suka disebut 'filsuf' dan lebih memilih disebut pemikir politis. Ia hampir tidak pernah dibahas dalam rangka fenomenologi. Ia sendiri tidak menyebut dirinya fenomenolog. Meski demikian tidak salah jika kita memasukkannya ke dalam para pemikir fenomenologi. Dermot Moran, misalnya, dalam bukunya menyejajarkan namanya di antara Husserl, Heidegger, dan Merleau-Ponty. Moran berkomentar demikian:

Meskipun Hannah Arendt hanya kadang mencirikan dirinya sebagai seorang fenomenolog dan memang tidak biasanya dimasukkan ke dalam ulasan buku teks mengenai fenomenologi, karyanya dapat layak dipahami sebagai sejenis fenomenologi, suatu fenomenologi tentang apa yang dalam bahasa Jerman diacu sebagai *Öffentlichkeit* (publisitas,

kepublikan), yakni “ruang publik” (*der öffentliche Raum*), ranah publik, *res publica*, “ruang penampakan”.¹

Dalam karya-karya Arendt memang tidak ada istilah-istilah yang biasa muncul dalam fenomenologi seperti *Einklammern*, reduksi fenomenologis, *Lebenswelt* atau *epoché*. Meski demikian, tidak dapat diragukan bahwa karya-karyanya, khususnya *Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft* dan *Vita activa*, merupakan deskripsi-deskripsi fenomenologis. Seperti banyak fenomenolog, Arendt, misalnya, bicara tentang dunia, tubuh, makna, penampakan, dst. Jadi, pemikirannya bisa kita kategorikan ke dalam fenomenologi.

Ambil contoh konsep yang akan kita bahas di sini, natalitas atau *Ge-burtlichkeit*. Natalitas bukan objek empiris seperti yang diteliti oleh sains, melainkan kata yang mengungkapkan penghayatan (*Erlebnis*) yang bersifat eksistensial. Kelahiran adalah kata untuk proses fisik yang menjadi objek biologi, kelahiran bayi, tetapi Arendt memaknai kata itu juga secara eksistensial yang tidak terbatas pada proses fisik. Lahirnya seorang bayi adalah permulaan baru bagi bayi itu dan bisa juga bagi orangtuanya karena ia hadir pertama kali di dunia ini dengan kelahirannya. “Permulaan baru” (*neuer Anfang*) ini adalah fenomen yang dapat ditarik ke dimensi eksistensial sebagai penghayatan seseorang atau sekelompok orang. Pengalaman eksistensial tentang permulaan baru itu tidak terjadi sekali saja, yakni sebagai kelahiran biologis, melainkan bisa terjadi berkali-kali, yakni setiap kali seseorang atau sekelompok orang mengalami permulaan baru. Misalnya, keputusan untuk berkeluarga atau keputusan para *founding fathers* untuk mendirikan republik dialami sebagai permulaan-permulaan baru. Fenomena yang oleh Arendt lalu disebut *natalitas* ini tidak dapat dipahami dengan sikap berjarak seperti yang dilakukan para ilmuwan di laboratorium, melainkan dengan sikap terlibat melalui ‘perspektif orang pertama’. Jadi, permulaan baru tidak sama dengan *reset* sebuah sistem yang adalah kontrol eksternal atas suatu mekanisme objektif, melainkan suatu peristiwa yang dialami.

1 Dermot Moran, *Introduction to Phenomenology* (London: Routledge, 2000), 287.

Jika mencermati pemikiran Arendt, kita akan menemukan suatu urutan logis dalam deskripsi fenomenologisnya. Natalitas ada pada urutan pertama sebagai dasar eksistensial manusia. Manusia adalah makhluk yang mampu memulai yang baru. Lalu, dari situ muncul konsepnya tentang tindakan (*Handeln*) pada urutan kedua. Mampu memulai yang baru adalah mampu bertindak, sementara bagi Arendt bertindak dan kebebasan adalah satu dan sama. Karena selalu mengandaikan orang lain, tindakan yang dimaksudkannya adalah tindakan kolektif, yakni ‘bertindak dan berbicara bersama’, maka pada urutan ketiga muncul fenomena ruang penampakan (*Erscheinungsraum*) atau – istilah yang lebih populer – ruang publik. Ruang penampakan bukan hanya hasil natalitas dan tindakan, melainkan juga syarat terjadinya natalitas dan tindakan. Hubungan timbal-balik ini terjadi karena dalam fase pendirian republik kemampuan membuat permulaan baru dan bertindak mendasari pembentukan ruang publik, sementara dalam republik yang sudah berdiri, natalitas dan tindakan terjadi dalam ruang publik.

Artikel ini akan mengikuti metode fenomenologis Arendt. Seperti biasa dilakukan dalam penelitian filsafat, saya juga akan menunjukkan alur pikiran Arendt, mengeksplitkan asumsi-asumsinya, dan mengomentarkannya secara kritis. Saya akan mengeksplitkan konsep Arendt tentang kebebasan, tentang tindakan (*Handeln*) sebagai gerakan legislasi publik, tentang kekuasaan komunikatif. Penelitian tentang konsep natalitas telah dilakukan beberapa peneliti, seperti misalnya yang ditulis Patricia Bowen-Moore dengan bukunya *Hannah Arendt's Philosophy of Natality* (1989), Rosalyn Diprose dan Ewa Plonowska Ziarek dengan buku mereka *Arendt, Natality and Biopolitics: Toward Democratic Plurality and Reproductive Justice* (2018), Miguel E Vatter dengan artikelnya “Natality and Biopolitics in Hannah Arendt” (2006).² Meskipun diskursus natalitas sudah cukup dikenal oleh para komentator Arendt, topik pemulihan demokrasi yang dihubungkan dengan konsep natalitas sebagaimana dilakukan dalam artikel ini memiliki kebaruan. Dengan topik itu juga kita dapat mengaktu-

2 Dalam *Revista de ciencia política* 26, no. 2 (2006): 137-59, <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-090X2006000200008>

aliskasikan pemikiran Arendt dalam konteks politik kontemporer, setelah mengomentarnya secara kritis dalam konteks digitalisasi masyarakat.

II. MASSA DAN GERAKAN LEGISLASI PUBLIK

Ada dua karya Arendt yang sangat penting untuk memahami apa itu tindakan dalam politik, yaitu *Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft* dan *Vita activa* (1960). Keduanya bicara tentang tindakan kolektif, yaitu: tindakan yang dilakukan oleh sekumpulan individu secara bersama-sama. Namun dalam kedua karya itu ia bicara tentang dua tipe fenomena yang berbeda, yang praktis juga mengacu kepada dua tipe tindakan kolektif yang berbeda. Perbedaan ini ada dan khas Arendt yang menjadi korban Nazi Jerman, tetapi tetap implisit dalam tulisan-tulisannya. Kegagalan membedakan keduanya dapat menimbulkan kesalahpahaman yang menyesatkan baik ketika membaca Arendt atau ketika menilai kondisi lapangan. Fenomena yang dibicarakannya dalam *Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft* (1955) adalah massa, sedangkan dalam *Vita activa* (1960)³ ia membicarakan apa yang boleh kita sebut gerakan legislasi (dari publik atau yang lebih dikenal sebagai gerakan *civil society*). Istilah ini bukan sekadar neologisme saya sebagai komentatornya. Hal ini implisit dalam konsepnya tentang tindakan (*Handeln*) yang akan saya jelaskan di bawah ini. Pada tataran lain gerakan ini juga mengungkapkan kebebasan sebagai determinasi diri kolektif. Legislasi publik adalah proses pelibatan publik dalam revisi, pengesahan, atau penolakan undang-undang, dan proses ini berlangsung dalam ruang publik dan bukan proses legislasi parlementer yang berlangsung dalam DPR yang hasilnya justru menjadi objek diskursif gerakan legislasi publik.

Salah satu alasan mengapa massa dan gerakan legislasi publik kerap sulit dibedakan adalah karena dalam perspektif pengamat keduanya sama-sama adalah himpunan individu-individu. Namun keduanya ber-

3 *Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft* adalah terjemahan Arendt sendiri yang terbit pada tahun 1955 atas *The Origin of Totalitarianism* yang terbit dalam bahasa Inggris di tahun 1951. *Vita activa* adalah terjemahan Arendt yang terbit tahun 1960 atas *The Human Condition* yang terbit tahun 1958. Di dalam artikel ini saya membaca terjemahan Jermannya.

beda dalam hal sumber tindakan, hubungan antara individu dan kolektif, dan tipe tindakan kolektif yang dihasilkan. Dewasa ini di era digital, keduanya tidak hanya hadir secara korporeal di jalan-jalan, melainkan juga dalam media-media sosial, sehingga situasi politis kontemporer semakin kompleks. Menurut Arendt sumber tindakan massa adalah rasa kesepian dan keterasingan satu sama lain. Istilah yang dipakai Arendt adalah “*Verlassenheit*” (keterlantaran) dan “*Atomisierung*” (atomisasi). Orang yang terlantar merasa “tidak menggantung kepada dirinya sendiri, sehingga dirinya setiap saat dan di manapun dapat ditukar dengan diri yang lain”.⁴ Massa lahir dari situasi negatif itu dan bukan dari kebebasan. Alih-alih kebebasan, mereka yang terlantar itu justru siap menyerahkan kebebasan mereka kepada dominasi totaliter. Mereka tersedia untuk dipakai secara politis. Arendt menulis demikian:

Apa yang membuat orang-orang modern begitu mudah mengidam-idamkan gerakan-gerakan totaliter dan mempersiapkan mereka sedemikian baik untuk dominasi totaliter adalah keterlantaran yang makin menjadi-jadi di mana-mana. Hal itu terjadi, seakan-akan segala yang mengikat orang-orang satu sama lain hancur ke dalam krisis sehingga setiap orang ditinggalkan oleh setiap orang lain dan tidak ada yang tersisa lagi.⁵

Orang merasa terlantar atau ditinggalkan, jika orang kehilangan “dunia bersama”, tercerabut darinya, sampai bahkan kehilangan dirinya. Dalam analisis Arendt atomisasi itu berpangkal dari “keruntuhan masyarakat kelas”. Jadi, ketika struktur kelas menjadi kabur, nilai-nilai bersama hilang, “para individu yang putus asa dan dipenuhi kebencian” bergerombol sebagai massa.⁶ Tindakan kolektif massa bukan hasil kebebasan para anggotanya, melainkan hasil mobilisasi lewat propaganda dan teror, yakni hasil ketidakbebasan.

4 Hannah Arendt, *Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. Antisemitismus, Imperialismus, totale Herrschaft* (München: Piper, 1996), 679.

5 Arendt, *Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft*, 978.

6 Arendt, *Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft*, 677.

Di sisi lain, alih-alih terbentuk dari isolasi, atomisasi, dan ketidakbebasan, gerakan legislasi publik terbentuk dari kebebasan dan komunikasi, yakni dari “berbicara dan bertindak bersama”.⁷ Dalam *Vita activa* Arendt memang tidak memakai istilah gerakan legislasi publik, melainkan ‘tindakan’ (*Handeln*), tetapi legislasi publik implisit dalam konsep itu. Istilah ini juga mengingatkan kita akan istilah Kant *öffentliche Gesetzgebung* (legislasi publik) yang kemudian juga diambil alih oleh Max Weber dengan konsepnya tentang tindakan (*Handeln*). Konsep Arendt tentang tindakan juga mengimplikasikan pengertian khas Arendt tentang kebebasan, yakni kebebasan sebagai determinasi diri kolektif. Karena itu tipe tindakan kolektif ini jelas berbeda secara diametral dari massa yang adalah wujud ketidakbebasan. Menurut Arendt tindakan bukanlah hal yang dilakukan sendirian; ia selalu mensyaratkan kehadiran orang lain yang berbeda-beda.⁸ Menyelam sampai ke dasar-dasar eksistensi negara, Arendt melihat bahwa suatu negara, republik, atau polis, sesungguhnya dihasilkan dari determinasi diri kolektif para warganya. Artinya, polis adalah hasil legislasi publik:

Jadi tepatnya polis bukanlah kota dalam pengertian lokasi geografis, melainkan struktur organisasi penduduknya, sebagaimana ia *muncul dari berbicara dan bertindak satu sama lain*; ruangnya yang sesungguhnya terletak di antara mereka yang hidup bersama demi kesalingan ini, tidak tergantung pada tempat mereka berada. “Di manapun kalian berada, kalian menjadi polis” – (...) dalam ungkapan itu dinyatakan bahwa bertindak dan berbicara *mendasarkan suatu ruang-antara* yang tidak terikat dengan tanah air dan dapat menyebar terus di mana-mana di dunia yang dimukimi.⁹

Bagi Arendt tindakan sudah menyiratkan kebebasan, karena “bertindak dan berbicara” hanya dapat dilakukan oleh makhluk-makhluk yang bebas dan berbeda satu sama lain. Artinya, menjadi bebas adalah sama

7 Bdk. Hannah Arendt, *Vita activa. Oder Vom tätigen Leben* (München: Piper, 1996), 234.

8 Arendt, *Vita activa*, 17

9 Arendt, *Vita activa*, 250 (cetak miring dari saya).

dengan bertindak.¹⁰ Kebebasan dan keragaman itulah hal-hal yang memungkinkan komunikasi. Tulisnya:

Tanpa perbedaan, kerberlainan mutlak setiap pribadi dari setiap pribadi lain yang ada dahulu, sekarang, atau nanti, tidak dibutuhkan bahasa maupun tindakan untuk saling mengerti.¹¹

Di samping itu menurut Arendt tindakan—yakni tindakan kolektif dari tipe gerakan legislasi publik—adalah kekuasaan (*Macht*) itu sendiri. Di sini Arendt memberi pengertian baru untuk kekuasaan. Kekuasaan bukanlah pemaksaan “kehendak sendiri” juga dengan “melawan ketidakpatuhan”, sebagaimana dipahami dalam teori politik sejak Weber¹², melainkan determinasi diri kolektif yang dihasilkan lewat berbicara dan bertindak bersama. Habermas memberi istilah yang tepat untuk konsep kekuasaan Arendtian itu: kekuasaan komunikatif (*kommunikative Macht*), yakni: “kekuasaan keyakinan-keyakinan bersama yang dihasilkan secara komunikatif”.¹³ Rumusan Arendt dalam *Macht und Gewalt* (1970) demikian:

Kekuasaan adalah kemampuan manusia bukan hanya untuk bertindak atau untuk melakukan sesuatu, melainkan untuk bersepakat dengan orang-orang lain dan untuk bertindak dalam persetujuan dengan mereka.¹⁴

Jadi, Arendt tidak mengasalkan kekuasaan komunikatif kepada individu. Ia bukan milik seseorang, entah itu pejabat atau pemilik modal. Arendt mengasalkannya kepada kelompok yang mampu mendeterminasi diri

10 Patricia Bowen-Moore, *Hannah Arendt's Philosophy of Natality* (London: The Macmillan Press, 1989), 29.

11 Arendt, *Vita activa*, 213.

12 Max Weber, *Soziologische Grundbegriffe* (Tübingen: JCB Mohr – Paul Siebeck), 89.

13 Jürgen Habermas, “Hannah Arendt's Communications Concept of Power”, in *Hannah Arendt Critical Essays*, ed. Lewis P. Hinchman et.al. (New York: State University of New York Press, 1994), 213; bdk. Wolfgang Heuer, “Ein schwieriger Dialog. Die Hannah Arendt-Rezeption im deutschsprachigen Raum”, in *Hannah Arendt. Nach dem Totalitarismus*, ed. Daniel Ganzfried et.al. (Hamburg: Europäische Verlagsanstalt, 1997), 25.

14 Hannah Arendt, *Macht und Gewalt* (München: Piper, 1995), 45.

secara kolektif atau – sebut saja – *suatu komunitas yang bertindak*. Dari komunitas inilah berlangsung legislasi publik.

Arendt dikenal sebagai seorang pemikir yang mengidealisasikan polis Yunani kuno sebagai partisipasi demokratis *par excellence*. Posisinya disebut republikanisme bukan dalam arti bentuk negara, melainkan dalam arti cara memahami kebebasan sebagai determinasi diri kolektif.¹⁵ Seperti dikatakan di atas menurutnya polis bukan hanya konstruksi arsitektural, melainkan terutama adalah konstruksi legal yang dihasilkan dari determinasi diri kolektif. Sebaliknya, determinasi diri kolektif itu pada gilirannya dimungkinkan oleh polis:

Sebelum tindakan itu sendiri dapat mulai, sebuah ruang terbatas harus diselesaikan dan dipastikan yang di dalamnya orang-orang yang bertindak lalu dapat tampil, ruang wilayah publik dari polis yang struktur internalnya adalah undang-undang; legislator dan arsitek termasuk ke dalam kategori profesi yang sama.¹⁶

Ada hubungan sirkular di sini: Gerakan legislasi publik *qua* determinasi diri kolektif menghasilkan undang-undang, dan undang-undang pada gilirannya memberi ruang bagi gerakan legislasi publik, ruang yang kita sebut ‘ruang publik’ dan disebut Arendt ‘ruang penampakan’ (*Erscheinungsraum*) atau ‘ruang-antara’ (*Zwischenraum*).

Kita dapat menyimpulkan bahwa ciri gerakan legislasi publik berkebalikan dari ciri massa. Sementara massa berasal “dari terurainya suatu masyarakat yang telah teratomisasi”, “tiadanya kontak”, “ketercerabutan”, “penuh kebencian”, dan “hilangnya dunia bersama”¹⁷, gerakan legislasi publik ini justru terbentuk lewat kekuasaan komunikatif mereka yang berhimpun untuk mendasarkan suatu dunia bersama, yakni *res publica* atau – dalam kosakata Arendt – polis. Jika memakai tipologi Arendt tentang kegiatan dasar manusia, massa adalah hasil modus “karya” (*Herstellen*):

15 Maurizio Passerin d’Entrèves, *The Political Philosophy of Hannah Arendt* (London: Routledge, 1994), 65–102.

16 Arendt, *Vita activa*, 244.

17 Arendt, *Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft*, 677- 679, dan 682.

Tindakan orang banyak dalam kesalingan diganti dengan sebuah kegiatan yang hanya membutuhkan satu orang yang tidak terganggu tetap menjadi tuan atas kegiatannya dari awal sampai akhir.¹⁸

Massa bukan hasil kebebasan sebagai determinasi diri kolektif, melainkan hasil rekayasa dan mobilisasi atas mereka yang justru dideterminasi dari luar diri mereka, yakni dari *der Führer*, pentolan mereka. *Kristallnacht*, yakni pogrom kepada Yahudi Jerman di tahun 1938, misalnya, bukan hasil deliberasi publik, melainkan hasil mobilisasi massa yang destruktif dan dimotivasi kebencian. Mobilisasi massa bukan hanya cermin tiadanya ruang publik, melainkan juga ketidakmampuan untuk bertindak dari kebebasannya sendiri, karena para anggota massa digerakkan dari luar. Ciri itu berbeda sekali dari gerakan legislasi publik yang justru merupakan “tindakan” (*Handeln*) dalam ruang publik, wujud keberanian warga (*civil courage*), maka para pesertanya tidak berpikir dengan ‘logika massa’, melainkan dengan mengikuti suara hati mereka. Salah satu contohnya adalah *Civil Rights Movement* dibawah pimpinan Martin Luther King Jr. di Amerika Serikat pada tahun 50-an yang bergerak atas dasar konstitusi dan bertujuan untuk menghapus segregasi ras.

III. NATALITAS, TINDAKAN, DAN RUANG PENAMPAKAN

Akar primordial tindakan dan dengan demikian juga gerakan legislasi publik adalah apa yang disebut Arendt ‘natalitas’ atau *Geburtlichkeit* dalam bahasa Jerman. Dengan istilah ini Arendt mengubah pemahaman lazim tentang kelahiran menjadi sebuah kategori filosofis.¹⁹ Natalitas tidak terbatas pada peristiwa biologis, melainkan juga peristiwa politis dan bahkan peristiwa eksistensial dan ontologis. Hal ini mengingatkan kita akan dosennya, Martin Heidegger, yang secara ontologis mencirikan *Dasein* sebagai *Sein-zum-Tode*, berada-menuju-kematian. Alih-alih pada kematian dan akhir, Arendt fokus pada kelahiran dan awal. Natalitas bukan sekadar atribusi untuk manusia sebagai eksistensi yang dapat memulai sesuatu. Seperti dikomentari Patricia Bowen-Moore, konsep

¹⁸ Arendt, *Vita activa*, 279.

¹⁹ Patricia Bowen-Moore, *Hannah Arendt's Philosophy of Natality*, 2.

itu memiliki pengertian biologis, politis, dan teoretis.²⁰ Di sini kita fokus pada natalitas politis.

Terinspirasi oleh Agustinus, Arendt membedakan antara *principium* dan *initium*, yaitu antara “awal segala awal” dalam penciptaan dunia yang menjadi kondisi bagi segala awal lainnya dan awal dalam arti potensi untuk memulai sesuatu. *Principium* adalah fondasi metafisis dan transendental segala sesuatu, sedangkan *initium* adalah kemunculan baru yang tidak ditentukan oleh prinsip sebelumnya, melainkan murni muncul dari kebebasan. Allah dalam Kitab Kejadian meletakkan *principium*, dan baru kemudian mencipta manusia. Dalam kalimat Agustinus, *Ut initium esset, creates est homo*, manusia diciptakan supaya ada suatu awal. Manusia bukanlah suatu *principium*, melainkan suatu *initium*, dan hal ini menurut Arendt menyangkut kemampuan untuk bertindak:

Karena tiap orang atas kenyataan kelahirannya adalah suatu *initium*, suatu permulaan dan seorang pendatang baru di dalam dunia ini, orang dapat mengambil inisiatif, menjadi pemula, dan menggerakkan sesuatu yang baru.²¹

Seperti dikomentari Habermas, “bertindak berarti mengambil inisiatif dan mengerjakan hal yang tidak dapat diantisipasi”.²² Kita masih dapat menemukan jejak Pencerahan Eropa dalam pemikiran Arendt ini. Natalitas atau kemampuan untuk membuat permulaan baru ini menurutnya dapat mematahkan kemewaktuan siklis dari dunia nasib yang tertutup – lahir, kawin, dan mati – menjadi kemewaktuan linear dari dunia sosial yang terbuka dan terdiri atas tindakan-tindakan dalam sejarah.²³

Berbeda dari Heidegger yang memahami tindakan sebagai *Be-sorgen*, yaitu kesibukan sehari-hari yang membuat lupa akan ber-

20 Bowen-Moore menata isi buku komentarnya menurut tiga pengertian tersebut. Lih. *Hannah Arendt's Philosophy of Natality*, 1, 21, 42, dan 69.

21 Arendt, *Vita activa*, 215.

22 Habermas, “Hannah Arendt's Communications Concept of Power”, 215.

23 Bdk. Hans Saner, “Die politische Bedeutung der Natalität bei Hannah Arendt”, in *Hannah Arendt. Nach dem Totalitarismus*, ed. Daniel Ganzfried et.al. (Eropäische Verlagsanstalt: Hamburg, 1997), 108.

ada-menuju-kematian (*Sein-zum-Tode*), Arendt justru memahaminya sebagai cara penyingkapan eksistensial baru yang mematahkan kecemasan akan nasib menuju kematian. Jadi, bukan kesadaran akan kematian yang membuat manusia autentik, melainkan kemampuannya untuk bertindak, yakni—yang sama dengan itu—untuk membuat permulaan baru.²⁴ Kemampuan autentik manusia ini sudah dimiliki tiap manusia dalam kelahirannya. Di sini kita mendapat pengertian pertama tentang natalitas, yakni natalitas biologis. Natalitas biologis adalah kelahiran seorang bayi yang membawa potensi tindakan, yakni membuat permulaan baru. Karena semua orang telah lahir, semua orang membawa potensi natalitas itu, tetapi natalitas biologis menurut Arendt tidak cukup untuk membawa perubahan. Natalitas biologis harus dikonfirmasi dalam natalitas politis.

Arendt melukiskan natalitas politis itu secara fenomenologis sebagai penyingkapan jati diri seseorang di atas panggung yang disaksikan banyak orang atau ruang publik. Demikian lukisannya:

Dengan bertindak dan berbicara masing-masing orang mewahyukan siapa diri mereka, aktif memperlihatkan keunikan pribadi hakikat mereka, seakan-akan tampil di atas panggung dunia yang sebelumnya mereka tidak kelihatan di atasnya, yaitu selama tanpa kegiatan mereka hanyalah sosok tubuh mereka dan bunyi suara mereka yang sedikit tampil.²⁵

Dengan keterlibatan dalam ‘ruang penampakan’ manusia juga memulai sesuatu yang baru: ia mendapat kehidupan kedua, yakni sebagai warganegara.²⁶ Bagi Arendt berpartisipasi di dalam ruang publik sebagai warganegara adalah “suatu kelahiran kedua yang meneguhkan fakta belaka keterlahiran kita”.²⁷ Namun bukan hanya itu, tampil ke hadapan publik juga berarti melakukan “perbuatan-perbuatan besar” yang menggugah publik secara moral, seperti misalnya, terjadi saat munculnya pemimpin yang autentik, yang berani, atau yang berintegritas.

24 Arendt, *Vita activa*, 215.

25 Arendt, *Vita activa*, 219.

26 Bowen-Moore, *Hannah Arendt's Philosophy of Natality*, 48.

27 Lih. Arendt, *Vita activa*, 215.

Dari ulasan di atas jelaslah bahwa hubungan antara gerakan legislasi publik dan natalitas politis tidak bersifat aksidental, melainkan esensial. Bertindak dalam ruang publik seperti berpartisipasi dalam gerakan legislasi publik, adalah kegiatan politis *par excellence* karena berakar pada natalitas. Contoh yang paling nyata adalah pendirian sebuah republik dan penyusunan konstitusinya. Di dalam legislasi publik ini tindakan politis tidak dapat dibedakan dari memulai suatu tatanan politis baru. Dalam perspektif Arendtian Sukarno, Hatta, Yamin, dan para anggota Panitia Sembilan lainnya sebagai legislator UUD 45 menginisiasi suatu ruang publik, yang memungkinkan orang-orang dapat bertindak bukan sebagai elemen kerumunan belaka (*massa*), melainkan sebagai warganegara. Saya kutipkan keterangan Bowen-Moore:

Realisasi penuh kemampuan (seorang aktor politis) untuk memulai hal-hal baru... adalah pengalaman natalitas politis sebagai kemampuan untuk menciptakan suatu ruang publik di antara diri seseorang dan orang-orang lain sehingga kebebasan dapat tampak.²⁸

Dengan demikian natalitas politis tidak mengacu kepada pergantian kekuasaan pada umumnya, seperti dalam politik dinasti di berbagai kerajaan di masa silam, melainkan kepada demokratisasi.

Bagi Arendt natalitas politis seperti terjadi dalam pendirian *res publica* tidak terjadi sekali saja, melainkan terjadi berkali-kali dalam demokrasi sebagai legislasi publik. *Pathos* permulaan baru inheren dalam politik demokratis. Jadi, di mana pun warganegara berhimpun untuk menyampaikan aspirasi mereka dalam suatu tindakan kolektif untuk mengajukan atau merevisi suatu undang-undang atau menolak suatu rezim, di situ pula natalitas politis terjadi, yakni darinya terjadi permulaan baru dalam politik. Contohnya adalah Civil Rights Movement di USA di tahun 60-an, gerakan-gerakan demokratisasi di Eropa Timur pasca komunisme, dan gerakan reformasi pasca Suharto di Indonesia pada tahun 1998.²⁹ Di

28 Bowen-More, *Hannah Arendt's Philosophy of Natality*, 50.

29 Bdk. Margaret Canovan, "Verstehen oder Mißverstehen: Hannah Arendt, Totalitarismus und Politik", in *Hannah Arendt. Nach dem Totalitarismus*, ed. Daniel Ganzfried et.al., 55.

tahun 2025 dan awal 2026 ini dunia bahkan sedang menyaksikan krisis rezim Mullah di Iran dan kemungkinan kelahiran baru bangsa Iran, asal-rakyat Iran mampu menentukan diri secara kolektif di tengah eskalasi perang antara rezim Iran versus Amerika dan Israel.³⁰ Dalam pengertian Arendtian ini suatu masyarakat dan demokrasi memperbarui diri terus menerus melalui kekuasaan komunikatif para warganegara yang berakar pada natalitas politis.

Pembaruan terjadi karena republik memiliki pasang dan surut kehidupan yang dinamis. Jika membandingkan kedua buku Arendt, *Ursprünge totaler Herrschaft* dan *Vita activa*, kita tidak hanya menemukan dua tipe tindakan kolektif yang berbeda dalam kedua buku itu, yaitu massa dan gerakan legislasi publik, melainkan juga dua ‘cerita’ berbeda tentang natalitas politis. Suatu rezim teror seperti fasisme dan komunisme yang menghapus pluralitas dan menghancurkan dunia yang dikonstruksi bersama membuat para individu tidak lagi mampu bertindak dan tidak lagi sanggup mulai yang baru. Dalam arti itu totalitarianisme bukan hanya hancurnya republik, melainkan – saya pinjam istilah Bowen-Moore – “perversi natalitas” atau “antithesis natalitas politis”.³¹ Cerita kelam itu diberikan dalam buku totalitarianisme, namun dalam *Vita activa* kita mendapat kisah sebaliknya tentang natalitas politis, bukan sebagai kekuatan perversif, melainkan sebagai kekuatan rehabilitatif.

Karena republik dibangun lewat tindakan, pemulihan bagi republik yang hancur juga dilakukan lewat tindakan. Dalam konteks inilah *Vita activa* bicara tentang pengampunan (*Verzeihen*) dan janji (*Versprechen*). Pengampunan dan janji adalah tindakan-tindakan yang mengungkapkan natalitas sebagai suatu momen yang amat menentukan.³² Menurut

30 Di lapangan kemurnian gerakan anti-rezim ini, seperti kebanyakan gerakan politis lainnya, tentu dapat dipersoalkan. Infiltrasi asing dan pasokan dana oligarki bisa ikut bermain untuk menghasilkan provokasi di tengah-tengah masalah yang tereskalasi menjadi kian kompleks. Namun, jika rezim itu represif, *forceps birth* juga suatu kelahiran baru.

31 Lih. Bowen-More, *Hannah Arendt's Philosophy of Natality*, 45.

32 Lih. Marguerite La Caze, “The Miraculous Power of Forgiveness and the Promise”, in *Action and Appearance. Ethics and the Politics of Writing in Hannah Arendt*, ed. Anna Yeatman et.al. (New York: Continuum), 150.

Arendt manusia memikul beban bagi tindakannya, karena tindakan memiliki dua ciri dasar, yakni “tak dapat ditarik kembali” (*unwiederruflich*) dan “tak dapat dipastikan” (*unvorhersehbar*). Tindakan itu mewaktu (*zeitlich*) dan terjadi lewat keputusan bebas yang unik, situasional, dan dilakukan sebagai lompatan ke dalam ketidakpastian. Seperti banyak korban kesewenangan rezim totaliter, Arendt juga mengambil jarak atas konsep tindakan rasional, sebagaimana kita temukan pada Weber, Luhmann, dan Habermas. Dalam hal ini pemahaman Arendt realistis:

...(T)ak seorang pun, kalau ia bertindak, sungguh mengetahui apa yang ia lakukan...pelaku selalu akan bersalah...sebagai akibatnya ia menerima suatu kesalahan yang tidak pernah dimaksudkannya atau yang juga hanya dapat dikendalikannya...betapa pun sial dan tidak diharapkan mungkin hal yang dilakukannya, ia tidak pernah sanggup membuat hal itu dapat ditarik kembali...³³

Manusia mendunia dengan bertindak; ia seolah mengalami ‘kejatuhan eksistensial’ dengan tindakannya. Kejatuhan itu atau –dikatakan secara positif– keterlibatan di dalam dunia membuatnya tidak sepenuhnya menyadari tindakannya, maka satu-satunya jalan untuk menebus kebersalahan tindakan adalah lewat tindakan juga:

Obat untuk hal tak dapat ditarik kembali –yakni hal yang telah dilakukan tidak dapat dibatalkan meskipun orang tidak mengetahui dan tidak dapat mengetahui apa yang dilakukannya –terletak pada kemampuan manusia untuk mengampuni. Dan obat untuk hal ketidakpastian –yakni untuk ketidakpastian kaotis segala yang di masa depan –terletak pada kesanggupan untuk memberi janji dan menepatinya.³⁴

Dengan demikian sebagaimana pendasaran republik dilakukan lewat tindakan, republik yang hancur dapat dipulihkan juga lewat tindakan, yakni lewat tindakan pengampunan dan janji.

Melepaskan kesalahan di masa lalu dengan mengampuni dan mengurangi ketidakpastian di masa depan dengan berjanji adalah kemam-

33 Arendt, *Vita activa*, 297.

34 Arendt, *Vita activa*, 301.

puan manusia untuk memulai lagi sesuatu yang baru. Bagi Arendt pengampunan dan janji adalah penyingkapan natalitas politis.³⁵ Lahir dari kebebasan sebagai determinasi diri kolektif, pengampunan dan janji membuat sesuatu yang baru terjadi, dan hal itu terjadi di luar perkiraan, melampaui ekspektasi, dan tidak dapat diprediksi, maka menurut Arendt natalitas politis terjadi bagai “mukjizat”.³⁶ Kita dapat menemukan contoh-contohnya dalam peristiwa runtuhnya tembok Berlin dan berakhirnya apartheid di Afrika Selatan. Dalam *Vita activa* pengampunan dan janji dibahas tersendiri, tetapi maknanya sentral untuk memahami natalitas politis. Kita boleh mengatakan bahwa Arendt memahami pengampunan dan janji sebagai natalitas politis itu sendiri karena permulaan baru dan pemulihan dalam politik terjadi melalui kedua tindakan itu.³⁷

Suatu republik yang hancur oleh kejahatan luar biasa melawan kemanusiaan, seperti misalnya *holocaust* di Perang Dunia II, peristiwa G30S/PKI di tahun 1965, atau Gulag di era Stalin, hanya dapat pulih jika terjadi “mukjizat” pengampunan dan janji. Tanpa pengampunan kesalahan akan mengikat komunitas politis pada dendam dan balas membalas. Pengampunan membebaskan pihak yang mengampuni sekaligus pihak yang diampuni dari konsekuensi tindakan mereka sehingga dapat memulihkan *res publica* dari luka sejarahnya. Tanpa janji masa depan tetap tidak pasti. Membuat dan menepati janji adalah cara suatu komunitas politis untuk menjaga *res publica* dari peristiwa-peristiwa negatif di masa depan.³⁸

Dalam pemahaman Arendt, karena merupakan tindakan (*Handeln*) yang mengandaikan adanya orang lain dan bukan karya (*Herstellen*) yang dapat dilakukan sendirian, pengampunan dan janji tidak dapat dilakukan dalam isolasi.³⁹ Ada satu atau lebih orang yang mengampuni dan

35 Bdk. Arendt, *Vita activa*, 307.

36 Konsep Arendt tentang mukjizat tidak terbatas pada pengertian religius. Mukjizat adalah perubahan yang tidak terduga dalam politik. Lih. Hannah Arendt, *The promise of politics* (New York: Schocken, 2005), 1112.

37 Bdk. Marguerite La Caze, “The Miraculous Power”, 151.

38 Bdk. Arendt, *Vita activa*, 306.

39 Lih. Marguerite La Caze, “The Miraculous Power”, 155.

yang diampuni, atau yang berjanji dan yang menerima janji. Di dalam konteks kehidupan politis pengampunan adalah rekonsiliasi politis, sedangkan janji adalah kontrak. Karena bagi Arendt politik harus dipisahkan dari afeksi (*Leidenschaft*), kedua tindakan itu tidak didasari oleh cinta, melainkan oleh respek. "Bagi Arendt", demikian La Caze," respek adalah semacam persahabatan politis, tanpa intimitas atau kedekatan, dengan ruang dunia di antara kita, dan tidak tergantung pada kualitas-kualitas yang kita akui."⁴⁰ Sementara itu, "cinta menurut kodratnya tidak hanya tak berdunia, melainkan bahkan merusak dunia, dan karenanya tidak hanya apolitis, melainkan juga antipolitis—barangkali yang paling perkasanya dari segala kekuatan antipolitis."⁴¹ Karena pengampunan dan janji dipahami tidak dalam rangka cinta, melainkan respek, keduanya tidak melebur dalam kedekatan intim, melainkan tetap memelihara jarak di antara orang-orang. Dalam konteks politis inilah pengampunan dan janji *qua* tindakan politis dilaksanakan dalam gerakan legislasi publik.

Tidak sulit untuk membaca *Vita activa* sebagai ontologi politis dari sisi harapan. Terhadap pelanggaran berat atas hak-hak asasi manusia di masa lalu suatu komunitas politis harus memilih salah satu dari dua sikap: atau menyangkal beban sejarah itu dan justru tersandera olehnya atau melepaskan beban sejarah itu lewat pengampunan dan janji. Natalitas politis hanya mungkin terjadi dengan memilih sikap terakhir. Dengan mengacu kepada Alkitab Arendt menulis:

"Mukjizat"nya, dengan kata lain, adalah kelahiran orang-orang baru dan permulaan baru, tindakan yang dapat mereka lakukan berkat dilahirkan. Hanya jika sisi tindakan ini dialami sepenuhnya, sesuatu seperti "iman dan harapan" dapat ada, kedua ciri hakiki eksistensi manusia yang ditolak orang Yunani... Iman akan dan harapan akan dunia inilah yang barangkali menemukan ungkapan yang paling mulia dan paling padat dalam sedikit kata-kata yang dengannya Injil mengumumkan 'kabar gembira': "Seorang anak telah lahir untuk kita".⁴²

40 Marguerite La Caze, "The Miraculous Power", 160.

41 Arendt, *Vita activa*, 310.

42 Lih. Arendt, *Vita activa*, 317.

Locus kuasa pemulihan bukan saja pada orang-orang baru yang mengisi panggung politis, melainkan pada *civil courage* mereka sebagai penerus-penerus *res publica*. Hanya jika orang-orang baru berani memulai yang baru secara politis, natalitas dialami sebuah republik. Natalitas politis, kelahiran baru suatu republik, dimungkinkan oleh kebebasan sebagai determinasi diri kolektif.

IV. NATALITAS POLITIS DI ERA DIGITAL

Masih dapatkah suatu demokrasi yang rusak dipulihkan? Itulah pertanyaan awal kita. Jawabannya secara filosofis yang telah kita dapatkan dari pemikiran Arendt adalah “ya”. Namun, *Realpolitik* membuat kita harus memberikan jawaban yang berbeda dan penuh perhitungan. Konsep Arendt tentang natalitas itu bertolak dari kondisi yang berbeda dari kondisi empiris kita, yakni era komunikasi digital. Tiga pokok berikut perlu diperhitungkan. *Pertama*, konsep tindakan yang mendasari gerakan legislasi publik mengandaikan kehadiran korporeal, padahal tindakan digital dilakukan dengan telepresensi dan tanpa kehadiran orang lain.⁴³ *Kedua*, Arendt juga mengandaikan bahwa kekuasaan komunikatif itu murni, tak terkontaminasi kepentingan pragmatis, dan muncul dari dirinya sendiri, padahal dalam kenyataan yang bahkan menjadi kian parah di era digital, komunikasi itu sendiri telah dimanipulasi sebagai alat kekuasaan, dan gerakan-gerakan protes dihasilkan lewat provokasi para *buzzers* dengan hoaks dan disinformasi, sehingga makin sulit disebut sebagai suatu gerakan moral.⁴⁴ *Ketiga*, kebebasan republikan, yakni determinasi diri kolektif, mengandaikan adanya *embodied community* dalam ruang penampakan, padahal di dalam ruang digital yang terjadi adalah “*communication without community*”, karena para individu tetaplah terisolasi satu sama lain dan terhubung hanya secara aksidental sebagai *echo chamber*.

43 Lih. F. Budi Hardiman, *Aku Klik Maka Aku Ada. Manusia dalam Revolusi Digital* (Yogyakarta: Kanisius, 2021), bab 6.

44 Saya pernah melontarkan kritik ini di tempat lain. Lih. F. Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif. Menimbang 'Negara Hukum' dan 'Ruang Publik' dalam Teori Diskursus Jürgen Habermas* (Yogyakarta: Kanisius, 2009), 96.

Secara umum dapat dikatakan bahwa Arendt masih percaya akan fungsi kritis ruang publik dan rasionalitas kritis untuk demokrasi, terutama untuk memulihkannya, jika mengalami kerusakan. Kita berada dalam era berbeda sehingga Jürgen Habermas yang dulu banyak belajar dari Arendt untuk konsepnya tentang ruang publik pun dalam karya terbarunya memberi diagnosis baru untuk era kita sebagai ‘transformasi struktural baru ruang publik’ yang menurutnya ditandai dengan “tendensi pelampauan batas (*Entgrenzung*), tetapi juga fragmentasi (*Fragmentierung*) ruang publik”⁴⁵. Sambung dengan diagnosis ini, Byung Chul Han menandai era kita sebagai era ‘infokrasi’ yang di dalamnya praktik-praktik politis mengalami perubahan mendasar:

Ponsel menjadi sebuah parlemen bergerak, suatu forum debat di manapun dan kapanpun. *Real-time Democracy*, ini impian di hari-hari awal digitalisasi, dalam kenyataannya adalah sebuah ilusi. Kawan digital bukanlah suatu kelompok bertanggungjawab yang dapat bertindak secara politis, melainkan para pengikut yang dilatih oleh para *influencer* cerdas dan menjadi ternak konsumtif. Mereka didepolitisasi. Komunikasi yang dikontrol dengan algoritma dalam media sosial tidaklah bebas dan juga tidak demokratis. Komunikasi itu menghasilkan suatu ketidakdewasaan baru. Ponsel bukanlah sebuah parlemen bergerak, melainkan sebuah piranti dominasi.⁴⁶

Makna diagnosis Han ini jelas: ada bentuk baru keterlantaran (*Verlassenheit*) di era digital.

Di era digital ini bentuk-bentuk kekuasaan juga mengalami perubahan, sehingga heroisme republikan a la Arendt terlihat konyol. Kalau dahulu pembatasan dan pengawasan berciri eksternal dan dilakukan oleh struktur institusional yang tampak, seperti ditunjukkan Foucault pada institusi penjara, pendidikan, rumah sakit, dst., di era digital ini kekuasaan beroperasi tidak lagi dengan larangan, melainkan justru dengan dorongan, tidak lagi dengan disiplinisasi tubuh, melainkan dengan eksploitasi psikis. Tak ada lagi pengawas, seperti sipir, guru, dokter, dst.,

45 Lih. Jürgen Habermas, *Ein neuer Strukturwandel der Öffentlichkeit und die deliberative Politik* (Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 2022), 11 dan 47.

46 Byung-Chul Han, *Infocracy* (Cambridge: Polity Press, 2022), bab 3.

melainkan, seperti ditunjukkan oleh Han, para warga tidak merasa diawasi sebab mereka mengawasi diri dan menyerahkan data mereka secara sukarela. Ruang publik digital bukanlah ruang penampakan, melainkan menjadi ruang manipulasi perhatian lewat pencitraan. Di sini kekuasaan justru beroperasi lewat kebebasan. Dalam situasi baru ini heroisme warga gampang diserap menjadi konten-konten digital yang *entertaining*, tetapi tidak *transforming*.

Politikpun, yang diyakini Arendt sebagai *locus* kebebasan manusia, berubah menjadi teknologi sosial berbasis survei, *polling*, dan algoritma untuk kontrol perilaku warga yang pada akhirnya memberi keuntungan bagi perusahaan-perusahaan media dalam sistem baru yang disebut Zuboff “surveillance capitalism”.⁴⁷ Sambung dengan pemahaman Arendt sendiri, wilayah bertindak (*Handeln*) di era digital semakin diokupasi oleh berkarya (*Herstellen*). Dalam lanskap baru ini kemampuan natalitas tidak lenyap, tetapi tereduksi menjadi variasi dalam sistem yang telah memetakan kemungkinan sebelumnya. *Initium* tidak lagi dilarang, melainkan diserap ke dalam logika prediksi dan optimasi. Konsep natalitaspun tampak utopis karena ketakterdugaan yang menandai *initium* dalam politik hilang dan diganti dengan prediksi dan kalkulasi algoritmik.

Saya bahkan tergoda untuk mengatakan bahwa fenomena massa yang dilukiskan Arendt dalam *Ursprünge totaler Herrschaft* justru dapat banyak berbicara –lebih daripada ulasannya dalam *Vita activa*– untuk apa yang terjadi dalam ruang digital dewasa ini, seperti: hubungan searah antara *influencer* dan *viewers*, kesepian, ketakberakaran, polarisasi kawan-lawan politis, retorika *posttruth*, dan *cyber-bullying*, sehingga memang dalam ruang digital yang algoritmik itu manusia tampak tidak penting atau –dalam kata Arendt– “berlebihan” (*überflüßig*). Ada sekurangnya tiga paralelisme antara politik digital dan politik totaliter yang patut diperhatikan sebelum kita dapat menjawab pertanyaan tentang pemulihan demokrasi.

47 Bdk. Schoshana Zuboff, *The Age of Surveillance Capitalism* (New York: Public Affairs, 2023), 255-310.

Pertama, ruang digital itu sendiri, meskipun tampak transparan, bukan ruang penampakan seperti yang dimengerti oleh Arendt. Manakala kebebasan berbicara berubah menjadi kebebasan berbohong, transparansi digital yang lalu menjadi panoptis justru menutupi kepentingan-kepentingan untuk mengontrol perilaku. Tidak perlu pengawasan *Gestapo* (polisi rahasia Nazi) di situ, karena ironisnya pengguna ponsel merelakan privasi datanya ditambang dan dikendalikan algoritma. *Kedua*, dalam ruang digital itu pluralitas yang menjadi kondisi untuk tindakan politis pun direduksi menjadi uniformitas yang narsistik. Semua ingin tampak unik, tetapi justru dengan cara itu semua terjebak ke dalam algoritma yang menyeragamkan. Memang tidak ada lagi kerumunan seragam yang memuja *Führer*, tetapi para pengguna ponsel secara ironis seragam memuja diri mereka dan terperangkap dalam *echo chamber*. *Ketiga*, politik bisa ada hanya jika ada yang non-politis, tetapi jika politik merembes ke mana-mana, kondisi hiperpolitis ini sekaligus membunuh politik dalam arti republikan. Auschwitz tidak lagi diperlukan untuk menghapus politik dan mengubahnya menjadi *bare life*, karena warganet menganonimisasi diri mereka sendiri dan bersembunyi di balik tiap opininya sehingga tidak muncul sebagai person politis.

Tidak sulit membayangkan bahwa paralelisme politik digital dan politik totaliter itu juga memerversi natalitas politis. Di era digital memang tidak ada rezim teror yang melumpuhkan kemampuan untuk memulai sesuatu yang baru. Namun kondisi komodifikasi komunikasi di dalam ruang digital itu sudah cukup menyulitkan para individu untuk membuat permulaan baru. Natalitas tidak lagi bertolak dari kebebasan sebagai determinasi diri kolektif, melainkan ditangkap oleh pasar sebagai inovasi wajib bagi kesintasan perusahaan. Natalitas yang terprogram secara industrial ini memang menghasilkan produk-produk, seperti *start-ups*, konten-konten kreatif untuk Youtube, atau inovasi-inovasi, tetapi hal-hal itu bukan 'realitas-realitas baru' secara politis yang dihasilkan dalam kebebasan sebagai determinasi diri kolektif. Di sini kita perlu cermat: inovasi-inovasi dalam masyarakat kapitalistis, seperti fesyen, gaya hidup, metode pemasaran, program TV, konten digital, dst. adalah paso-

kan-pasokan untuk sirkulasi sistem pasar dan bukan peristiwa-peristiwa politis yang mematahkan *politics as usual*. Inovasi-inovasi digital itu pada gilirannya malah mengokohkan *establishment* rezim neo-liberal, sehingga membuat permulaan yang baru dalam politik menjadi sama sulitnya seperti *debunking* propaganda dan teror Nazi. Bagaimana membuat permulaan baru dalam rutinisasi inovasi pasar ini?

Di sini kita perlu mengingat bahwa natalitas politis dalam pengertian Arendtian bukanlah politik rutin. Di atas sudah dikutip bahwa Arendt memahami natalitas sebagai “mukjizat” dalam arti suatu yang muncul tidak dari kausalitas dunia, melainkan suatu peristiwa permulaan yang merupakan patahan dari kesinambungan dunia. Ada determinasi yang ditanggihkan sehingga terbukalah hal-hal yang tidak terduga. Natalitas politis dalam arti Arendtian ini juga tetap berlaku juga ketika politik didigitalisasi. Memang digitalisasi hidup dari logika dirupsi, perubahan terus menerus, dan inovasi wajib yang rutin, sehingga memulai yang baru bukanlah suatu ‘mukjizat’, ‘patahan kesinambungan’, atau hasil kebebasan bertindak, melainkan merupakan bagian dari pasokan data rutin ke dalam sistem informasi yang anonim. Di dalamnya inovasi, kreativitas, dan produktivitas merupakan bagian determinasi sistemis. Bagaimana mungkin terjadi natalitas politis, kalau permulaan baru tidak sungguh baru, melainkan merupakan bagian rutin perilaku yang ‘dirobotisasi’ oleh algoritma? Agar permulaan itu sungguh baru, harus ada ‘patahan’ dari determinasi algoritmik sehingga terbukalah ruang spontanitas dan ketakterdugaan. Algoritma membuat komunikasi menjadi *Herstellen*, bukan lagi *Handeln*.

Pertanyaan kita sekarang, apakah konsep Arendt tentang natalitas masih relevan untuk era digital? Agar dapat bicara untuk zaman kita menurut hemat saya, konsep natalitas perlu direinterpretasi secara realistik. Memulai sesuatu yang baru dalam politik yang telah dikuasai oleh algoritma adalah sebuah ‘patahan’ dari hal-hal yang diarahkan oleh algoritma. Kebaruan itu mungkin bukan sebagai bagian dari desain algoritmik, karena jika demikian, tidak ada kebaruan, melainkan repetisi; kebaruan hanya mungkin sebagai peristiwa yang mengganggu, mensabotase, me-

ngacaukan, atau singkatnya: mematahkan desain itu sehingga autentisitas tindakan (*Handeln*) menjadi mungkin. Dengan ungkapan lain, di era digital ini natalitas politis adalah sebuah praksis resistensi atas determinasi algoritmik itu.

Mengacu kepada antropologi politis Arendt, determinasi algoritmik mendegradasi *Handeln* (tindakan para warga suatu republik) menjadi *Herstellen* (perilaku reaksioner hasil manipulasi media sosial) dan bahkan memburuk menjadi *Arbeiten* (perilaku robotik tanpa berpikir). Determinasi itu harus diganggu dan dilawan agar terbuka lagi kemungkinan untuk membuat permulaan baru dalam politik. Kalau panggung tidak lagi dapat menjadi tempat untuk menyatakan kebebasan bertindak karena dikuasai para manipulator, dan kalau para pemain dikendalikan oleh skenario asing yang bukan rencana mereka, panggung itu harus dibersihkan lebih dahulu dari para manipulator dan skenario itu, agar para pemain dapat bertindak bebas lagi di atasnya, sehingga visibilitas tidak lagi diatur oleh algoritma dan logika data, melainkan oleh spontanitas dan autensitas para pemain. Membuka kembali kemungkinan untuk memulai sesuatu yang baru yang di sini kita ilustrasikan sebagai pembersihan panggung ini adalah hasil praksis resistensi atas determinasi algoritmik, dan sebagaimana dipahami oleh Arendt kemampuan untuk resistensi itu adalah kemampuan natalitas manusia untuk memulai kembali dunia bersama dan bukan sekadar memperbarui algoritma.

Memahami natalitas sebagai praksis resistensi bukan hal yang bertentangan dengan pengertian Arendtian tentang natalitas. Dalam masyarakat yang jenuh dengan determinasi algoritmik—ingat bagaimana ruang digital dipenuhi manipulasi, distorsi, disinformasi—permulaan baru tidak bisa lain daripada melawan perilaku *mainstream*, sebagaimana dalam politik konvensional dilakukan sebagai *civil disobedience*. Praksis ini tidak harus sama dengan revolusi karena tidak menggulingkan sistem secara frontal, melainkan menyelamatkan kemungkinan untuk memulai sesuatu yang baru dalam tatanan terdigitalisasi. Tujuannya bukan untuk mengganti tatanan politis yang sudah demokratis, melainkan menyelamatkan ruang kebebasan dan pluralitas dari reduksi algoritmik di dalam

tatanan digital. Berbeda dengan revolusi, praksis ini tidak dilakukan secara kolektif-korporeal, melainkan secara dispersif-terdesentralisasi dan interruptif untuk mematahkan otomatisme dan perilaku robotik. Strategi *Be Water* yang diambil oleh Gerakan Protes di Hong Kong di tahun 2019 dapat menjadi salah satu contoh bentuk resistensi atas determinasi algoritmik. Untuk memprotes RUU Extradisi dari Tiongkok para pemrotes menggunakan taktik “flash mob” yang tak terduga dan cepat, organisasi tanpa pemimpin yang memakai *platforms* digital dan membuat gerakan ini sulit ditekan pihak otoritas.⁴⁸ Gerakan ini memutus pola, menggagalkan prediksi, dan membuat kegaduhan politis yang sukar ditangani algoritma. Beberapa gerakan lain di era digital yang tak terprediksi algoritma, bukan sekadar viral, melainkan terlebih merupakan ‘patahan’ dari sistem yang ada, adalah Gerakan #Me Too untuk melawan pelecehan seksual dan School Strike for Climate di depan parlemen Swedia yang dilakukan Greta Thurberg seorang diri tahun 2018. Natalitas di era digital terkait erat dengan kemampuan suatu gerakan untuk menarik atensi politis warganet dan warganegara.

Dengan memakai teknologi digital dan AI kekuasaan memang subtil dan intensif, tetapi sesungguhnya tidak pernah total. Algoritma yang bekerja dalam teknologi digital beroperasi dengan data masa lalu, sedangkan masa depan tetap merupakan ruang ketidakpastian, sehingga keberanian bertindak (*Handeln*) memang menginisiasi sesuatu yang baru. Kebebasan manusia bukan sekadar ‘algoritma biologis’ yang bisa ditransfer menjadi algoritma digital. Kebebasan selalu menghasilkan ‘surplus makna’ dan tidak dapat direduksi ke teknologi, bahkan ketika teknologi menjadi dominan.⁴⁹ Selalu ada celah antara yang dapat diprediksi dan yang nyatanya dilakukan manusia, dan dalam celah inilah kebebasan masih mungkin. Dalam kondisi manipulatif pun, misalnya dalam de-

48 *Be water* adalah filsafat gerakan protes itu yang diinspirasi oleh Bruce Lee yang mengajarkan: “Be formless, shapeless, like water...”. Lih. Joel Kwong et.al., “Be Water – Insights into the Hong Kong Citizen Protest Movement”, pada <https://www.goethe.de/prj/zei/en/art/22072105.html?srsId=frontalfrAfmBOop4GP3B40crDs6T9FT-Z5OwaOPIo66FX5GY68OUA-8Pn3vo0oSLI>

49 Bdk. Mark Coeckelbergh, *The Political Philosophy of AI* (Cambridge: Polity Press, 2022), 73-118.

mokrasi elektoral, bisa terjadi mobilisasi tak terduga, seperti contoh di atas, perubahan opini mendadak, atau munculnya figur yang ada di luar agenda. Natalitas di era digital, sebagaimana di era sebelumnya, tetap membutuhkan keberanian bertindak, sekalipun tindakan itu menghasilkan anomali.

Tanpa keberanian gerakan legislasi publik tidak akan timbul. Praksis resistensi di zaman mana pun membutuhkan *parrhesia*. Seperti dicermahkan oleh Foucault di Berkeley tahun 1983, *parrhesia* adalah keberanian moral dalam berbicara, bukan sekadar berbicara, seperti kebanyakan orang di media-media sosial, melainkan berbicara benar dengan menghadapi risiko:

Parrhesia adalah suatu bentuk aktivitas berbicara di mana sang pembicara memiliki relasi khusus terhadap kebenaran melalui keterusterangan, relasi tertentu terhadap hidupnya melalui bahaya, relasi terhadap dirinya atau orang lain melalui kritik, serta relasi terhadap hukum moral melalui kebebasan dan kewajiban.⁵⁰

Parrhesia merupakan praksis resistensi karena berani mengatakan kebenaran bukan sekadar beropini, *chatting*, atau berargumen, melainkan juga keberanian mempertaruhkan hidup demi kebenaran, dalam kebebasan dan bukan karena paksaan atau hasil indoktrinasi.

Praksis resistensi atas determinasi algoritmik dapat juga dilakukan dalam berbagai bentuk lain yang tidak kurang frontal dan subversif untuk masyarakat terdigitalisasi, seperti: memperbanyak ruang hening di tengah kegaduhan politis, sehingga terjadi distansiasi atas ruang digital; pembelaan hak privasi atas data di tengah desakan transparansi total yang menjadi sarana kontrol baru; praktik *slow movements*, seperti: *slow living*, *slow communication*, *slow politics*, *slow education*, dst. untuk mempersepsi dan menimbang perkara secara mendalam dan menubuh agar dapat mengganggu akselerasi digital yang mengabaikan nilai-nilai etis; memperbanyak kesempatan pertemuan dalam *embodied communities* untuk merawat dunia bersama yang tergerus oleh digitalisasi; dan akhir-

50 Michel Foucault, *Fearless Speech* (Los Angeles: Semiotexte, 2001), 1.

nya, pemakaian media sosial sebagai sarana deliberasi publik. Kalaupun secara tidak langsung, bentuk-bentuk praksis resistensi ini sekurangnya dapat menyiapkan kondisi untuk mengalami kembali kebebasan bertindak yang menjadi syarat terjadinya natalitas.

ALIH-ALIH SEBUAH PENUTUP

Di akhir ulasan ini ada baiknya kita memeriksa lagi interpretasi kita atas konsep natalitas untuk menerangi praksis pemulihan demokrasi bukan untuk menyegelnya dari kritik, melainkan justru untuk membuka diskusi lebih lanjut. Pendekatan kritis seperti dilakukan Arendt kerap melupakan satu hal, yaitu bahwa manusia tidak selalu bersikap heroik dan prometean menghadapi kondisinya. Saya juga tidak dapat menghindari pengandaian antropologis itu ketika menginterpretasi konsepnya tentang natalitas. Kenyataan empiris tidak selalu demikian. Bagaimana kalau determinasi algoritmik justru memberi manusia rasa aman, rasa nyaman, tertib, dan bahkan pembebasan dari beban untuk bertindak politis? Determinasi algoritmik bisa saja dirasakan sebagai stabilitas yang memberi rasa kepastian.⁵¹ Perbedaan persepsi seperti itu adalah hal biasa dalam politik.

Pertanyaan kita pada gilirannya lalu juga terarah kepada demokrasi itu sendiri sebagai warisan Pencerahan Eropa. Jika demokrasi mensyaratkan para warganegara yang berpikir rasional dan bertindak secara bertanggungjawab dan persis di era digital syarat itu sulit dipenuhi, masih masuk akalkah kita berbicara tentang pemulihan demokrasi lewat natalitas atautkah kita seharusnya lebih berani menghadapi era ini sebagai akhir sejarah demokrasi itu sendiri sebagai suatu bentuk politis tertentu? Mungkinkah natalitas bisa saja berarti bahwa suatu republik mampu terus mengubah bentuk di tengah zaman yang berubah cepat, meskipun

51 Analisis saya di tempat lain ikut menjadi pertimbangan di sini. Lih. F. Budi Hardiman, *Memahami Negativitas. Massa, Teror, dan Trauma* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005); dalam psikologi kecenderungan ini juga ditemukan. Lih. Erich Fromm, *Escape from Freedom* (New York: Farrar & Rinehart, 1941), 3-66; 133-176. Untuk literatur baru yang menganalisis kecenderungan psikis ini: lih. Minna Ruckenstein, *The Feel of Algorithms* (Berkeley: University of California Press, 2023), 1-40; 85-132.

tidak harus berbentuk demokrasi? Kita tidak dapat memberi jawaban konklusif di sini. *Quaestiones manent apertae*. Pertanyaan tetap terbuka.

DAFTAR RUJUKAN

- Arendt, Hannah. *Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. Antisemitismus, Imperialismus, totale Herrschaft*. München: Piper, 1996.
- _____. *Vita activa. Oder Vom tätigen Leben*. München: Piper, 1996.
- Bowen-Moore, Patricia. *Hannah Arendt's Philosophy of Natality*. London: The Macmillan Press, 1989.
- Budi Hardiman, F. *Memahami Negativitas. Massa, Teror, dan Trauma*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005.
- _____. *Demokrasi Deliberatif. Menimbang 'Negara Hukum' dan 'Ruang Publik' dalam Teori Diskursus Jürgen Habermas*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- _____. *Aku Klik Maka Aku Ada. Manusia dalam Revolusi Digital*. Yogyakarta: Kanisius, 2021.
- Canovan, Margaret. "Verstehen oder Mißverstehen: Hannah Arendt, Totalitarismus und Politik." In *Hannah Arendt. Nach dem Totalitarismus*, edited by Daniel Ganzfried et.al. Hamburg: Europäische Verlagsanstalt, 1997.
- Coeckelbergh, Mark. *The Political Philosophy of AI*. Cambridge: Polity Press, 2022.
- D'Entrèves, Maurizio Passerin. *The Political Philosophy of Hannah Arendt*. London: Routledge, 1994.
- Foucault, Michel. *Fearless Speech*. Los Angeles: Semiotexte, 2001.
- Fromm, Erich. *Escape from Freedom*. New York: Farrar & Rinehart, 1941.
- Habermas, Jürgen, "Hannah Arendt's Communications Concept of Power." In *Hannah Arendt Critical Essays*, edited by Lewis P. Hinchman et.al. New York: State University of New York Press, 1994.
- _____. *Ein neuer Strukturwandel der Öffentlichkeit und die deliberative Politik*. Frankfurt a.M.: Shurkamp, 2022.
- Han, Byung-Chul. *Infocracy*. Cambridge: Polity Press, 2022.
- Heuer, Wolfgang, "Ein schwieriger Dialog. Die Hannah Arendt-Rezeption im deutschsprachigen Raum." In *Hannah Arendt. Nach dem Totalitarismus*, edited by Daniel Ganzfried et.al. Hamburg: Europäische Verlagsanstalt, 1997.

- La Caze, Marguerite, "The Miraculous Power of Forgiveness and the Promise." In *Action and Appearance. Ethics and the Politics of Writing in Hannah Arendt*, edited by Anna Yeatman et.al. New York: Continuum, 2011.
- Moran, Dermot. *Introduction to Phenomenology*. London: Routledge, 2000.
- Ruckenstein, Minna. *The Feel of Algorithms*. Berkeley: University of California Press, 2023.
- Saner, Hans. "Die politische Bedeutung der Natalität bei Hannah Arendt." In *Hannah Arendt. Nach dem Totalitarismus*, edited by Daniel Ganzfried et.al. Hamburg: Europäische Verlagsanstalt, 1997.
- Vatter, Miguel E. "Nativity and Biopolitics in Hannah Arendt." *Revista de ciencia política* 26, no. 2 (2006): 137-59, <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-090X2006000200008>.
- Weber, Max. *Soziologische Grundbegriffe*. Tübingen: JCB Mohr - Paul Siebeck.
- Zuboff, Schoshana. *The Age of Surveillance Capitalism*. New York: Public Affairs, 2023.